Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Strategi Politik Tughril Beg dalam Mengukuhkan Kekuasaan Seljuk dan Membangun Hubungan dengan Kekhalifahan Abbasiyah (1055–1063 M)

Ahmad Baihaqi
UIN Sunan Ampel Surabaya
03020223016@uinsa.ac.id
Achmad Zuhdi DH
UIN Sunan Ampel Surabaya
zuhdidh@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji strategi politik Tughril Beg dalam mengukuhkan kekuasaan Dinasti Seljuk serta membangun hubungan politik dengan Kekhalifahan Abbasiyah pada 1055–1063 M. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perubahan konfigurasi politik dunia Islam pada pertengahan abad ke-11 M yang ditandai melemahnya otoritas politik Abbasiyah, berakhirnya dominasi Buwaihi di Baghdad, dan meningkatnya kekuatan Seljuk. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi politik Seljuk dan Abbasiyah sebelum penguasaan Baghdad pada 1055 M, strategi Tughril Beg dalam mengonsolidasikan kekuasaan, serta peran hubungan Seljuk–Abbasiyah dalam pembentukan legitimasi dan stabilitas politik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan sejarah politik. Analisis menggunakan teori legitimasi kekuasaan Max Weber untuk memahami pembentukan dan penguatan otoritas Tughril Beg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuhan kekuasaan Tughril Beg dilakukan melalui penguasaan Baghdad, konsolidasi politik, kekuatan militer, diplomasi, serta pembangunan hubungan dengan Khalifah al-Qa'im. Hubungan Seljuk–Abbasiyah berlangsung melalui pertukaran dukungan politik: Seljuk memberikan perlindungan dan dukungan militer kepada khalifah, sementara khalifah memberikan pengakuan dan legitimasi terhadap kekuasaan Seljuk. Hubungan tersebut diperkuat melalui perkawinan Tughril Beg dengan Sayyida Khatun, putri Khalifah al-Qa'im, pada 1062 M dan berkembang menjadi pola pembagian otoritas politik dan keagamaan hingga wafatnya Tughril Beg pada 1063 M.

Kata Kunci: *Tughril Beg, Dinasti Seljuk, Kekhalifahan Abbasiyah, Strategi Politik, Legitimasi Kekuasaan.*

PENDAHULUAN

Pada pertengahan abad ke-11 M, dunia Islam mengalami perubahan konfigurasi politik yang ditandai dengan melemahnya kekuasaan politik Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan munculnya kekuatan-kekuatan baru di wilayah Timur Islam. Salah satu kekuatan yang berkembang pesat adalah Dinasti Seljuk. Kemenangan Seljuk atas Dinasti Ghaznawi dalam Perang Dandanqan tahun 1040 M menjadi momentum penting yang

memperkuat kedudukan Seljuk di Khurasan dan Persia. Perkembangan tersebut kemudian mendorong perluasan kekuasaan Seljuk ke Irak hingga mencapai Baghdad. Dalam proses tersebut, Tughril Beg tampil sebagai tokoh utama yang membangun dan mengonsolidasikan kekuasaan Seljuk serta mengarahkannya menuju pusat politik dunia Islam (Alawiah et al. 2025).

Kedatangan Tughril Beg ke Baghdad pada 1055 M memiliki arti penting karena mengakhiri dominasi politik Buwaihiyah dan menempatkan Seljuk sebagai kekuatan politik baru di Irak. Meskipun demikian, Tughril Beg tidak menghapus kedudukan Khalifah Abbasiyah, tetapi membangun hubungan politik dengan Khalifah al-Qa'im. Hubungan tersebut memberikan keuntungan bagi kedua pihak, yaitu Seljuk memperoleh legitimasi atas kekuasaan politiknya, sedangkan Abbasiyah mendapatkan dukungan militer dan politik. Kondisi ini kemudian membentuk pola hubungan antara sultan Seljuk sebagai pemegang kekuasaan politik dan militer dengan khalifah Abbasiyah sebagai sumber legitimasi keagamaan. Pola tersebut menjadi salah satu karakter penting dalam perkembangan politik Islam pada masa Seljuk (Farouqy 2021).

Pengukuhan kekuasaan Tughril Beg dengan demikian tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga melibatkan konsolidasi politik, diplomasi, hubungan dengan elite, dan pemanfaatan legitimasi khalifah. Penguasaan Baghdad menjadi bagian dari strategi tersebut karena keberadaan Abbasiyah masih memiliki nilai simbolis dan keagamaan yang kuat. Hubungan politik tersebut bahkan diperkuat melalui perkawinan Tughril Beg dengan keluarga khalifah. George Makdisi menunjukkan bahwa hubungan Tughril Beg dengan Khalifah al-Qa'im menjadi bagian penting dalam perkembangan kekuasaan Seljuk, sementara penguasaan Baghdad pada 1055 M menjadi titik penting dalam perubahan hubungan politik antara Seljuk dan Abbasiyah (Makdisi 2009). Oleh karena itu, strategi Tughril Beg perlu dipahami sebagai proses politik yang menggabungkan kekuatan militer dengan diplomasi dan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan Seljuk (Rohana 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas Tughril Beg dan perkembangan politik Seljuk. Avni Omer Lutfioglu melalui penelitian berjudul “The Personality of Seljuk Sultan Tugrul Bey in Arabic Sources”(Lutfioglu 2025) membahas kepribadian Tughril Beg berdasarkan sumber-sumber Arab serta hubungannya dengan Kekhalifahan Abbasiyah. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya hubungan Tughril Beg dengan Abbasiyah dalam memperoleh legitimasi dan menghadapi persoalan politik di Baghdad.

Penelitian Mustafa Sahin dan Ugur Arabaci berjudul "The Story Of An: The Power Struggle Of The Saljuk Statesman Taj Al-Mulk"(Sahin and Arabaci 2020) membahas perjuangan politik Tāj al-Mulk dalam memperoleh dan mempertahankan pengaruhnya di lingkungan pemerintahan Seljuk serta memperlihatkan dinamika perebutan pengaruh di kalangan elite politik. Sementara itu, penelitian Tuti Alawiah et al. dan AR Miftah Farouqy memberikan gambaran mengenai perkembangan Dinasti Seljuk dan kondisi politik dunia Islam pada periode tersebut.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa Seljuk dan hubungannya dengan Abbasiyah telah banyak dikaji dari berbagai perspektif. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan penguasaan Baghdad, konsolidasi kekuasaan, diplomasi, hubungan dengan elite, dan legitimasi khalifah sebagai satu kesatuan strategi politik Tughril Beg pada periode 1055–1063 M masih dapat dikembangkan. Penelitian ini menempatkan hubungan dengan Abbasiyah bukan sekadar sebagai hubungan politik antara dua kekuatan, tetapi sebagai salah satu instrumen yang digunakan Tughril Beg untuk mengukuhkan kekuasaan Seljuk. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi ruang kajian tersebut dengan melihat bagaimana berbagai instrumen politik digunakan secara bersamaan dalam proses penguatan kekuasaan Seljuk.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori legitimasi kekuasaan Max Weber (Weber 1978). Weber menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk memengaruhi atau mengendalikan pihak lain, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan terhadap kewenangan yang dijalankan. Weber membedakan legitimasi kekuasaan ke dalam tiga tipe ideal, yaitu legitimasi tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Dalam penelitian ini, teori legitimasi digunakan untuk memahami bagaimana Tughril Beg mengukuhkan kekuasaan Seljuk tidak hanya melalui kekuatan politik dan militer, tetapi juga melalui upaya memperoleh pengakuan dari Kekhalifahan Abbasiyah. Hubungan dengan Khalifah al-Qa'im, pemberian gelar, kerja sama politik, dan perkawinan dengan keluarga Abbasiyah dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat legitimasi kekuasaan Seljuk. Dengan demikian, teori legitimasi Weber digunakan untuk menganalisis hubungan antara kekuatan politik Tughril Beg dan pengakuan keagamaan serta simbolis yang dimiliki oleh Kekhalifahan Abbasiyah.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan politik untuk menganalisis strategi politik Tughril Beg dalam mengukuhkan kekuasaan Dinasti Seljuk serta hubungannya dengan Kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 1055–1063 M.

Pendekatan politik digunakan untuk mengkaji strategi kekuasaan, hubungan antarelite, diplomasi, serta proses pembentukan dan penguatan legitimasi politik dalam hubungan Tughril Beg dengan Kekhalifahan Abbasiyah. Metode sejarah dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Abdurahman 2011).

Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan Tughril Beg, Dinasti Seljuk, Kekhalifahan Abbasiyah, serta hubungan politik keduanya. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer dan sekunder, di antaranya Zubdat al-Nusra wa Nukhbat al-Usra, The History of the Seljuq Turks from the Zubdat al-Nusra wa Nukhbat al-Usra terjemah Kenneth Allin Luther (Luther 2001), dan The Annals of the Saljuq Turks Selections from al-Kamil fi-Ta'rikh of Ibn Al-Athir (Richards 2002), sedangkan sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah digunakan untuk melengkapi serta membandingkan informasi dari sumber primer.

Tahap kritik sumber dilakukan untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber yang diperoleh. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan dengan menganalisis dan menghubungkan fakta-fakta sejarah untuk memahami strategi politik Tughril Beg dalam mengonsolidasikan kekuasaannya serta membangun hubungan dengan Khalifah al-Qa’im.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah yang sistematis dan analitis. Dengan demikian, metode sejarah dan pendekatan politik digunakan secara terpadu untuk mengkaji strategi Tughril Beg tidak hanya dari aspek kekuatan militer, tetapi juga dari aspek konsolidasi kekuasaan, diplomasi, hubungan antarelite, dan legitimasi politik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi politik Dinasti Seljuk dan Kekhalifahan Abbasiyah sebelum penguasaan Baghdad oleh Tughril Beg pada tahun 1055 M, strategi politik Tughril Beg dalam mengukuhkan kekuasaan Seljuk pada tahun 1055–1063 M, serta hubungan politiknya dengan Kekhalifahan Abbasiyah dalam memperkuat legitimasi kekuasaan Seljuk pada periode tersebut. Penelitian ini penting untuk menunjukkan bahwa pembentukan kekuasaan Seljuk di Baghdad tidak hanya merupakan hasil keberhasilan militer, tetapi juga berkaitan dengan diplomasi, konsolidasi politik, hubungan elite, dan legitimasi keagamaan(Khairiyah 2024). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga permasalahan utama, yaitu (1) bagaimana kondisi politik Dinasti Seljuk dan Kekhalifahan Abbasiyah sebelum Tughril

Beg menguasai Baghdad pada tahun 1055 M, (2) bagaimana strategi politik Tughril Beg dalam mengukuhkan kekuasaan Seljuk pada tahun 1055–1063 M, serta (3) bagaimana hubungan politik Tughril Beg dengan Kekhalifahan Abbasiyah berperan dalam memperkuat legitimasi kekuasaan Seljuk pada tahun 1055–1063 M.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Politik Seljuk dan Abbasiyah Menjelang 1055 M

Memasuki pertengahan abad ke-11 M, dunia politik Islam mengalami perubahan yang ditandai dengan melemahnya kekuasaan pusat Abbasiyah dan munculnya kekuatan-kekuatan regional. Kekhalifahan Abbasiyah masih memiliki kedudukan penting sebagai pusat legitimasi keagamaan Sunni, tetapi kekuasaan politiknya telah mengalami penyusutan. Sejak pertengahan abad ke-10 M, Baghdad berada di bawah pengaruh Dinasti Buwaihi yang menguasai pemerintahan dan kekuatan militer, sedangkan khalifah Abbasiyah lebih banyak mempertahankan otoritas simbolis dan keagamaan. Meskipun demikian, kedudukan khalifah tetap penting karena pengakuan dan pemberian gelar dari khalifah dapat menjadi sumber legitimasi bagi penguasa-penguasa Muslim (Al- Qadhi 2026).

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena Dinasti Buwaihi sendiri mengalami persaingan internal dan kesulitan mempertahankan kekuasaan di wilayah Irak. Persaingan antar keturunan pendiri Buwaihi menyebabkan kekuatan politik mereka semakin terfragmentasi. Pada saat yang sama, perkembangan Seljuk di wilayah Persia memberikan tekanan baru terhadap kekuasaan Buyid. Seljuk sendiri pada awalnya merupakan kelompok Turki Oghuz yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik di wilayah Khurasan dan Persia. Perkembangan tersebut semakin kuat setelah Tughril Beg dan Chaghri Beg berhasil mengalahkan Dinasti Ghaznawi dalam Perang Dandanqan pada 1040 M (Luther 2001). Kemenangan tersebut membuka jalan bagi Seljuk untuk memperluas kekuasaannya ke wilayah Persia dan menjadikan Tughril Beg sebagai salah satu penguasa penting dalam perkembangan awal Dinasti Seljuk.

Sejak kemenangan Seljuk dalam Pertempuran Dandanakan pada 1040 M, Tughril Beg bersama Chaghri Beg berhasil memperluas kekuasaan Seljuk dari Khurasan menuju wilayah Persia bagian barat. Penguasaan Rayy, Isfahan, dan sejumlah wilayah lainnya memperkuat posisi Seljuk sekaligus membuka jalan bagi ekspansi ke Irak (Richards 2007).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan Seljuk menjelang 1055 M tidak lagi hanya bertumpu pada kemampuan militer kelompok Turkmen, tetapi mulai berkembang menjadi kekuasaan politik yang membutuhkan legitimasi dan struktur pemerintahan yang lebih luas. Tughril Beg berusaha menempatkan Seljuk dalam tatanan politik Islam yang telah ada. Karena itu, perluasan wilayah ke arah Irak memiliki arti yang lebih besar daripada sekadar ekspansi teritorial. Baghdad merupakan pusat kekhalifahan Abbasiyah sekaligus salah satu pusat politik terpenting di dunia Islam. Penguasaan Baghdad dapat memberikan Seljuk posisi strategis dalam menentukan arah politik kawasan sekaligus membuka kesempatan bagi Tughril Beg untuk memperoleh pengakuan atas kekuasaannya (Budak 2021).

Di sisi lain, posisi Khalifah Abbasiyah juga menghadapi persoalan yang membuat hubungan dengan kekuatan Seljuk semakin penting. Meskipun kekuasaan politik khalifah telah terbatas akibat dominasi Buwaihi, otoritas moral dan keagamaannya sebagai pemimpin komunitas Sunni tetap bertahan. Karena itu, Abbasiyah memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh penguasa baru, yaitu legitimasi politik dan keagamaan. Dalam tradisi politik pada masa tersebut, penguasa regional berusaha memperoleh pengakuan khalifah melalui pemberian gelar dan pengesahan kekuasaan. Dengan demikian, terdapat kepentingan yang saling bertemu antara Tughril Beg dan Abbasiyah: Tughril membutuhkan legitimasi untuk memperkuat kekuasaan Seljuk, sedangkan Abbasiyah membutuhkan kekuatan politik dan militer yang mampu mengurangi dominasi Buwaihi di Baghdad (Lutfioglu 2025).

Situasi tersebut menjadi latar belakang penting bagi masuknya Tughril Beg ke Baghdad pada 1055 M. Sebelum kedatangan Seljuk, penguasa Buwaihi al-Malik al-Rahim tidak mampu membangun kekuatan yang cukup untuk menghadapi tekanan Seljuk. Pada Desember 1055 M, Tughril Beg memasuki Baghdad dan tidak lama kemudian al-Malik al-Rahim ditangkap sehingga kekuasaan Buwaihi di Irak berakhir. Peristiwa tersebut menandai perubahan besar dalam konfigurasi politik Baghdad: dominasi politik yang sebelumnya berada di tangan Buwaihi beralih kepada Seljuk, sedangkan khalifah Abbasiyah tetap dipertahankan sebagai pemegang otoritas keagamaan dan simbolis (Rahman, Mahmud, and Kartika 2022).

Dengan demikian, kondisi politik menjelang 1055 M memperlihatkan adanya pertemuan kepentingan antara Seljuk dan Abbasiyah. Melemahnya kekuasaan politik Abbasiyah dan kemunduran Buwaihi menciptakan ruang bagi munculnya Seljuk sebagai

kekuatan baru. Sementara itu, perkembangan Seljuk di bawah Tughril Beg membuat mereka memiliki kemampuan militer dan politik untuk mengambil alih Baghdad. Kondisi inilah yang kemudian memungkinkan terbentuknya pola hubungan baru antara sultan Seljuk dan khalifah Abbasiyah. Bagi Tughril Beg, hubungan tersebut dapat menjadi sarana untuk mengubah kekuatan Seljuk dari kekuatan militer yang sedang berkembang menjadi kekuasaan yang memperoleh legitimasi dalam tatanan politik Islam. Sebaliknya, bagi Abbasiyah, kehadiran Seljuk menjadi jalan untuk mengakhiri dominasi Buwaihi sekaligus mempertahankan keberlangsungan kekhalifahan di Baghdad (Rohmatika, Afrizal, and Syawaluddin 2025).

Strategi Politik Tughril Beg dalam Mengukuhkan Kekuasaan Seljuk 1055–1063 M

Setelah memasuki Baghdad pada tahun 1055 M, Tughril Beg tidak hanya berusaha memperluas wilayah kekuasaan Seljuk, tetapi juga menjalankan strategi politik untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan yang telah diperolehnya. Penguasaan Baghdad memiliki arti penting karena kota tersebut merupakan pusat pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah sekaligus memiliki kedudukan simbolis yang kuat dalam dunia Islam. Masuknya Tughril Beg ke Baghdad pada Desember 1055 M mengakhiri dominasi Dinasti Buyiyah di Irak dan menjadikan Seljuk sebagai kekuatan politik utama di wilayah tersebut. Namun, Tughril Beg tidak menghapus kedudukan khalifah Abbasiyah. Sebaliknya, ia mempertahankan keberadaan khalifah sebagai sumber legitimasi keagamaan, sementara kekuasaan politik dan militer berada di bawah kendali Seljuk. Pola tersebut menunjukkan bahwa strategi Tughril Beg tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memanfaatkan struktur politik yang telah ada untuk memperkuat kedudukannya (Wangi and Mujab 2023).

Penguasaan Baghdad kemudian diikuti dengan upaya konsolidasi kekuasaan Seljuk. Tughril Beg menghadapi kondisi politik yang tidak sepenuhnya stabil karena masih terdapat kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan pengaruhnya di Irak. Oleh karena itu, keberhasilan menguasai Baghdad harus dilanjutkan dengan pengendalian terhadap berbagai kekuatan politik yang dapat mengancam pemerintahan Seljuk. Dalam proses tersebut, Tughril Beg berusaha memastikan bahwa kekuasaan politik dan militer berada dalam kendali pemerintahannya. Langkah ini penting karena kekuasaan Seljuk yang sebelumnya berkembang melalui ekspansi wilayah harus diubah menjadi pemerintahan yang lebih terorganisasi dan mampu

mempertahankan wilayah yang telah dikuasai. Dengan demikian, konsolidasi politik menjadi bagian penting dari strategi Tughril Beg dalam mengubah kekuatan militer Seljuk menjadi kekuasaan politik yang lebih stabil (Al-Iṣfahānī 1226).

Strategi penting lainnya adalah pemanfaatan hubungan dengan Kekhalifahan Abbasiyah sebagai sumber legitimasi. Meskipun Abbasiyah mengalami kemunduran dalam kekuasaan politik, kedudukan khalifah tetap memiliki kewibawaan keagamaan yang tinggi di kalangan masyarakat Muslim Sunni (Ilham et al. 2024). Tughril Beg memahami bahwa pengakuan dari khalifah dapat memberikan dasar legitimasi bagi pemerintahan Seljuk. Hubungan tersebut telah berkembang sejak sebelum penguasaan Baghdad dan semakin kuat setelah Tughril Beg memasuki kota tersebut. Khalifah al-Qa'im memberikan pengakuan terhadap kedudukan Tughril Beg sebagai penguasa Seljuk dan memberikan gelar yang memperkuat status politiknya. Dengan memperoleh pengakuan tersebut, kekuasaan Tughril Beg tidak hanya didasarkan pada kemampuan militernya, tetapi juga memperoleh legitimasi dari otoritas keagamaan Abbasiyah. Hubungan antara sultan dan khalifah tersebut kemudian menjadi salah satu ciri penting dalam pembentukan pola politik Seljuk-Abbasiyah (Kaymak 2024).

Hubungan politik dengan Abbasiyah juga diperkuat melalui hubungan dinasti. Hubungan politik dengan Abbasiyah juga diperkuat melalui hubungan dinasti. Pada 1061 M, Tughril Beg mengajukan permohonan untuk menikahi Sayyida Khatun, putri Khalifah al-Qa'im bi-Amr Allah. Setelah melalui proses perundingan, akad pernikahan dilaksanakan pada 1062 M di sekitar Tabriz, dengan mahar yang disebut mencapai seratus ribu dinar. Sayyida Khatun kemudian dibawa ke istana Tughril Beg pada 1063 M. Pernikahan tersebut memiliki arti politik yang penting karena menghubungkan keluarga penguasa Seljuk dengan keluarga Abbasiyah (Fathiha 2021). Melalui ikatan perkawinan tersebut, Tughril Beg tidak hanya memperkuat kedekatannya dengan khalifah, tetapi juga membangun hubungan dinasti antara kekuasaan Seljuk dan Abbasiyah. George Makdisi melihat persoalan perkawinan ini dalam konteks politik yang lebih luas, terutama usaha Tughril Beg untuk memperkuat kedudukannya dalam hubungan dengan kekhalifahan Abbasiyah (Makdisi 2009).

Meskipun telah memperoleh posisi yang kuat di Baghdad, Tughril Beg masih menghadapi ancaman dari kekuatan politik lain. Salah satu ancaman terbesar berasal dari Arslan al-Basasiri yang memperoleh dukungan dari Dinasti Fatimiyah. Pada 1058 M, al-Basasiri berhasil memasuki Baghdad dan mengambil alih kota tersebut untuk sementara

waktu. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penguasaan Baghdad pada 1055 M belum sepenuhnya menjamin stabilitas kekuasaan Seljuk. Tughril Beg kemudian kembali melakukan tindakan militer untuk menghadapi ancaman tersebut. Pada 1059 M, al-Basasiri berhasil dikalahkan dan dibunuh, sehingga kekuasaan Seljuk atas Baghdad dapat dipulihkan. Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat posisi Tughril Beg sebagai pelindung pemerintahan Abbasiyah dari ancaman politik yang berasal dari luar maupun dari kelompok yang berusaha menggantikan pengaruh Seljuk di Irak (Omer 2016).

Strategi politik Tughril Beg pada akhirnya memperlihatkan adanya perpaduan antara kekuatan militer, konsolidasi politik, dan legitimasi keagamaan. Ia menggunakan kekuatan militer untuk menguasai dan mempertahankan wilayah, tetapi tidak menjadikan kekuatan tersebut sebagai satu-satunya dasar pemerintahannya. Hubungan dengan Khalifah al-Qa'im dimanfaatkan untuk memperoleh legitimasi, sementara kedudukan khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol otoritas keagamaan. Pada saat yang sama, pengendalian terhadap Baghdad dan keberhasilan menghadapi al-Basasiri memperkuat posisi Seljuk sebagai kekuatan politik utama di Irak (Luther 2001). Strategi tersebut memungkinkan Tughril Beg membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan Abbasiyah: Seljuk memperoleh legitimasi keagamaan dan politik, sedangkan Abbasiyah memperoleh perlindungan militer dari kekuatan Seljuk. Dengan pola tersebut, Tughril Beg berhasil meletakkan dasar yang lebih kuat bagi pemerintahan Seljuk hingga akhir masa pemerintahannya pada 1063 M (Kalkan 2025).

Hubungan Tughril Beg dengan Kekhalifahan Abbasiyah dan Dampaknya terhadap Kekuasaan Seljuk

Hubungan Tughril Beg dengan Kekhalifahan Abbasiyah pada dasarnya berkembang dari hubungan antara kekuatan politik yang sedang tumbuh dengan otoritas keagamaan yang masih memiliki kewibawaan di tengah melemahnya kekuasaan politik khalifah. Kedudukan Abbasiyah pada pertengahan abad ke-11 menunjukkan adanya pemisahan antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik. Khalifah al-Qa'im bi-Amr Allah tetap memiliki kedudukan penting sebagai pemimpin keagamaan Sunni, sedangkan kekuasaan politik praktis telah banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan militer yang menguasai Baghdad. Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi terbentuknya hubungan baru antara Abbasiyah dan Seljuk. Tughril Beg tidak berusaha mengambil alih kedudukan khalifah, sementara Abbasiyah juga tidak memiliki kekuatan militer yang memadai untuk

berdiri sendiri. Hubungan keduanya kemudian berkembang atas dasar kebutuhan yang berbeda tetapi saling melengkapi (Dardiri, Waluyo, and Aquil 2023).

Dalam hubungan tersebut, posisi khalifah berfungsi terutama sebagai sumber pengesahan terhadap kekuasaan politik yang berada di luar dirinya. Hal ini berbeda dengan masa ketika khalifah Abbasiyah masih memiliki kendali langsung atas sebagian besar wilayah kekhalifahan. Pada masa Tughril Beg, pengakuan khalifah terhadap penguasa Seljuk memberikan makna penting karena kekuasaan Seljuk memperoleh tempat dalam tatanan politik Sunni. Sebaliknya, keberadaan Seljuk membuat Abbasiyah memiliki kekuatan politik yang dapat mendukung keberlangsungan kekhalifahan. Dengan demikian, hubungan Tughril Beg dan al-Qa'im dapat dilihat sebagai bentuk pembagian fungsi kekuasaan: khalifah mempertahankan otoritas simbolis dan keagamaan, sedangkan sultan menjalankan pemerintahan dan urusan militer. Pola ini kemudian menjadi karakter penting hubungan antara sultan Seljuk dan khalifah Abbasiyah (Abbas 2016).

Hubungan tersebut tidak berarti bahwa Abbasiyah sepenuhnya berada di bawah Seljuk ataupun bahwa Tughril Beg memiliki kebebasan tanpa batas dalam berhubungan dengan khalifah. Justru terdapat proses negosiasi mengenai batas kewenangan masing-masing. Kedudukan khalifah tetap diperlukan oleh Tughril Beg karena memberikan dasar legitimasi yang tidak dapat diperoleh hanya melalui kekuatan militer. Pada saat yang sama, al-Qa'im harus menerima kenyataan bahwa keberlangsungan kekhalifahan bergantung pada kekuatan politik Seljuk. Keadaan ini menghasilkan hubungan yang bersifat pragmatis. Kedua pihak mempertahankan kepentingannya masing-masing, tetapi menghindari pertentangan yang dapat melemahkan keduanya. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa politik Seljuk pada masa Tughril Beg tidak hanya membentuk struktur kekuasaan baru, tetapi juga menyesuaikan diri dengan institusi Abbasiyah yang telah lebih dahulu memiliki legitimasi dalam masyarakat Muslim (Tacong, Sapa, and Haeriyah 2025).

Dampak paling penting dari hubungan tersebut adalah munculnya pola legitimasi ganda dalam pemerintahan Seljuk. Kekuasaan Tughril Beg memiliki dasar militer dan politik sebagai sultan, tetapi pada saat yang sama memperoleh penguatan melalui pengakuan dari khalifah. Hal ini memberikan perbedaan antara kekuasaan Seljuk dengan kekuatan-kekuatan sebelumnya yang menguasai Baghdad. Seljuk tidak harus menggantikan Abbasiyah untuk menjadi penguasa politik. Sebaliknya, mereka dapat

menggunakan keberadaan Abbasiyah sebagai bagian dari struktur legitimasi pemerintahan. Dalam konteks ini, kekhalifahan tetap dipertahankan meskipun pusat kekuasaan politik telah berpindah kepada Seljuk. Pola tersebut memungkinkan Seljuk memperoleh legitimasi tanpa harus mengklaim kedudukan sebagai khalifah (Farikhah, Astutik, and Ashari 2024).

Perubahan hubungan tersebut juga berdampak pada kedudukan sosial-politik Seljuk di dunia Islam Sunni. Pengakuan terhadap Tughril Beg membantu mengubah citra Seljuk dari kekuatan militer pendatang menjadi penguasa yang memiliki kedudukan sah dalam tatanan politik Islam. Proses ini penting karena perluasan wilayah Seljuk sebelumnya lebih banyak bertumpu pada keberhasilan militer. Setelah memperoleh hubungan yang lebih erat dengan Abbasiyah, kekuasaan Seljuk memiliki dasar legitimasi yang lebih luas. Dengan demikian, pengakuan keagamaan dari khalifah berfungsi sebagai pelengkap terhadap kekuatan militer Seljuk, sehingga keduanya membentuk dasar yang lebih kuat bagi keberlangsungan pemerintahan. Kajian mengenai proses pembentukan negara Seljuk pada masa Tughril Beg juga menunjukkan bahwa hubungan dengan Abbasiyah merupakan bagian dari proses pembentukan legitimasi pemerintahan Seljuk (Nur et al. 2024).

Hubungan tersebut semakin menunjukkan kedekatan politik melalui perkawinan antara keluarga Seljuk dan Abbasiyah. Menjelang akhir pemerintahan Tughril Beg, ia menikahi Sayyida Khatun, putri Khalifah al-Qa'im bi-Amr Allah. Perkawinan tersebut bukan sekadar hubungan pribadi, tetapi mempertemukan dua keluarga yang berada pada pusat kekuasaan politik dan keagamaan. George Makdisi secara khusus menempatkan perkawinan Tughril Beg dalam konteks hubungan politik antara penguasa Seljuk dan keluarga Abbasiyah. Ikatan keluarga tersebut memperkuat hubungan dinasti sekaligus menunjukkan bahwa hubungan Seljuk-Abbasiyah telah berkembang melampaui kerja sama politik biasa (Makdisi 2009).

Dari sisi Abbasiyah, hubungan dengan Tughril Beg memberikan kesempatan untuk mempertahankan keberadaan kekhalifahan di tengah perubahan struktur politik. Khalifah tidak lagi menjadi penguasa politik tertinggi dalam praktik pemerintahan, tetapi tetap mempertahankan kedudukannya sebagai pusat legitimasi keagamaan. Sementara itu, bagi Seljuk, keberadaan Abbasiyah memberikan kerangka legitimasi bagi kekuasaan sultan. Hubungan tersebut dengan demikian menghasilkan bentuk keseimbangan baru, meskipun keseimbangan itu tidak sepenuhnya setara. Seljuk memiliki kekuatan politik

dan militer yang lebih besar, sedangkan Abbasiyah memiliki otoritas simbolis dan keagamaan. Pembagian tersebut memungkinkan kedua institusi tetap bertahan dengan fungsi yang berbeda (Yusuf 2013).

Dalam jangka lebih panjang, pola hubungan yang terbentuk pada masa Tughril Beg menjadi dasar bagi perkembangan hubungan antara kesultanan Seljuk dan Kekhalifahan Abbasiyah setelah 1063 M. Kekuasaan politik tidak lagi harus berada secara langsung di tangan khalifah untuk membuat Abbasiyah tetap berpengaruh. Sebaliknya, sultan Seljuk dapat menjalankan pemerintahan dengan tetap menempatkan khalifah sebagai sumber legitimasi. Oleh karena itu, dampak hubungan Tughril Beg dengan Abbasiyah tidak hanya terlihat pada penguatan pemerintahannya selama 1055–1063 M, tetapi juga pada terbentuknya pola hubungan politik antara sultan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan khalifah sebagai pemegang otoritas keagamaan dan simbolis. Pola inilah yang menjadi salah satu warisan politik penting dari pemerintahan Tughril Beg bagi perkembangan Dinasti Seljuk dan Abbasiyah pada periode berikutnya (Nasution 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi politik Tughril Beg dalam mengukuhkan kekuasaan Dinasti Seljuk pada 1055–1063 M merupakan proses yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga melibatkan konsolidasi politik, diplomasi, hubungan dengan elite, dan pemanfaatan legitimasi Kekhalifahan Abbasiyah. Kondisi politik dunia Islam yang ditandai dengan melemahnya kekuasaan politik Abbasiyah dan kemunduran Dinasti Buwaihi memberikan kesempatan bagi Seljuk untuk memperluas pengaruhnya ke Irak. Masuknya Tughril Beg ke Baghdad pada 1055 M dan berakhirnya kekuasaan Buwaihi menjadi titik penting dalam perubahan konfigurasi politik Baghdad, sekaligus menempatkan Seljuk sebagai kekuatan politik utama di wilayah tersebut.

Setelah menguasai Baghdad, Tughril Beg melakukan konsolidasi untuk mempertahankan kekuasaan Seljuk dan mengendalikan berbagai kekuatan politik yang masih berpotensi mengancam pemerintahannya. Pada saat yang sama, ia mempertahankan kedudukan Khalifah al-Qa’im sebagai pemegang otoritas keagamaan dan simbolis. Pengakuan khalifah terhadap Tughril Beg memberikan legitimasi bagi kekuasaan Seljuk, sedangkan kekuatan militer Seljuk memberikan perlindungan politik bagi Abbasiyah. Hubungan tersebut semakin diperkuat melalui perkawinan Tughril Beg

dengan Sayyida Khatun, putri Khalifah al-Qa'im, yang dilaksanakan pada 1062 M dan kemudian membawa hubungan Seljuk-Abbasiyah ke dalam ikatan dinasti.

Hubungan Tughril Beg dengan Kekhalifahan Abbasiyah pada akhirnya membentuk pola pembagian fungsi kekuasaan. Tughril Beg dan Seljuk memegang kendali atas pemerintahan serta kekuatan politik dan militer, sedangkan Khalifah Abbasiyah mempertahankan otoritas keagamaan dan simbolis. Hubungan tersebut bersifat pragmatis karena kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Bagi Tughril Beg, pengakuan khalifah memperkuat legitimasi kekuasaan Seljuk dalam tatanan politik Sunni, sedangkan bagi Abbasiyah, dukungan Seljuk membantu mempertahankan keberlangsungan kekhalifahan di Baghdad.

Dampak dari strategi dan hubungan tersebut terlihat pada terbentuknya dasar legitimasi yang memadukan kekuatan politik-militer Seljuk dengan otoritas keagamaan Abbasiyah. Seljuk tidak perlu menggantikan kedudukan khalifah untuk menjalankan kekuasaan politik, sementara Abbasiyah tetap dapat mempertahankan kedudukannya meskipun tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan politik tertinggi. Dengan demikian, strategi Tughril Beg selama 1055–1063 M berhasil membangun posisi Seljuk sebagai kekuatan politik utama di Irak sekaligus menciptakan pola hubungan antara sultan sebagai pemegang pemerintahan dan militer dengan khalifah sebagai sumber legitimasi keagamaan dan simbolis. Pola tersebut tidak hanya memperkuat pemerintahan Tughril Beg hingga akhir masa pemerintahannya pada 1063 M, tetapi juga menjadi dasar penting bagi perkembangan hubungan Seljuk dan Abbasiyah pada periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Nurlaelah. 2016. "Pemikiran Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah." *Jurnal Tabligh Edisi* 17(1):68–83. doi:https://doi.org/10.24252/jdt.v17i1.6077.

Abdurahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Al- Qadhi, Abdulnaser Abdulrahman Aakef. 2026. "The Relationship between the Buyid Authority and the Religious Institution in Iraq: A Study of Political and Social Interaction (334–447 AH / 945–1055 CE)." *Journal of Basic Scince* 22(40):611–26. doi:https://doi.org/10.31185/bsj.Vol22.Iss40.1634.

Al-Iṣfahānī, 'Imād al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad. 1226. "Zubdat Al-Nusra Wa Nukhbat Al-ʿUsra."

Alawiah, Tuti, Sofiatunnaziah, Burhanudin, and Ahmad Maftuh Sujana. 2025. "Dinasti Seljuk Dalam Sejarah Peradaban Islam." *Istoria: Jurnal Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari* 9(2). doi:DOI:

http://dx.doi.org/10.33087/istoria.v9i2.255.
Budak, Yusuf. 2021. "Abbasid-Seljuk Relations During The Period Of Abbasid Khalifah Al-Muqtadi Bi-Amr Allah." *Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal* 39(November):14–29. doi:http://doi.org/10.17740/eas.soc.2021.V39-02.
Dardiri, Muhammad Amiruddin, Waluyo, and Anzar Aquil. 2023. "Kondisi Sosial-Politik Dinasti Bani Abbasiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24(1):69–82. doi:https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.318.
Farikhah, Iftitakhul, Yuni Astutik, and M. Yahya Ashari. 2024. "Perkembangan Pendidikan Masa Daulah Abbasiyah." *Ats-Tsaqofi: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 6(1):11–20. doi:https://doi.org/10.61181/ats-tsaqofi.v6i1.387.
Farouqy, AR Miftah. 2021. "Peradaban Islam Pada Masa Dinasti-Dinasti Kecil Di Timur Baghdad." *Jurnal Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 9(1):41–57. doi:https://doi.org/10.24252/rihlah.v9i1.18664.
Fathiha, Nuril. 2021. "Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah (Periode Kemunduran)." *Istoria:Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 17(1):1–8. doi:https://doi.org/10.21831/istoria.v17i1.38076.
Ilham, Muhammad, Junarti, Aisyah, and Bahaking Rama. 2024. "Biografi Para Khilafah Dan Kegemilangan Peradaban Islam Pada Masanya Sampai Diruntuhkan Oleh Bangsa Mongol." *Ulil Albab:Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(2):185–94. doi:https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2773.
Kalkan, Gonull Bayram. 2025. "The Sultan Crowned By The Pen: Ideology And The Image Of The Ruler İn Seljuk Chronicles." *Turk Tarihi Arastırmaları Dergisi* 10(2):30–31. doi:https://doi.org/10.56252/turktarars.1826152.
Kaymak, Suat. 2024. "The Dominance Capture Attempt of Caliph Al-Qā'im Bi-Amr Allāh Against The Seljuks." *Trakya University Journal of Faculty of Letters Is Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License. Giriş* 14(28):269–87. doi:10.33207/trkede.1470499.
Khairiyah, Saidatul. 2024. "Madrasah Nizhamiyah; Patronase Kekuasaan Dinasti Bani Saljuk." *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 8(4):543–58. doi:http://dx.doi.org/10.47006/er.v8i4.22482.
Lutfioglu, Avni Omer. 2025. "The Personality of Seljuk Sultan Tugrul Bey in Arabic Sources." *Ayıntâb Araştırmaları Dergisi* 8(2):260–75. doi:https://doi.org/10.71353/gunaad.1698671 İntihal:
Luther, Kenneth Allin. 2001. *The History of the Seljuq Turks From The Jami' Al-Tawarikh*. New York: Routledge.
Makdisi, George. 2009. "TUgRUL BEY'S MARRIAGE1." *Tarih Okulu İlkbahar 2009* 3(111):139–59. doi:https://izlik.org/JA59TU49TB.
Nasution, Syamruddin. 2017. "Penyebab Kemunduran Peradaban Islam Pada Abad Klasik." *An Nida':Jurnal Pemikiran Islam* 41(1):1–15. doi:https://doi.org/10.24014/an-nida.v41i1.4633.
Nur, Alimah, Fitriani Octaviana Nur, Mutmainnah Siti, Nurjannah Okta Vira, and Abbas. 2024. "Dominasi Keluarga Barmaki, Buwaihi, Dan Saljuk Dalam Dinamika Politik Abbasiyah." 2(4):48–59. doi:https://doi.org/10.59966/setyaki.v2i4.1232.
Omer, Tokus. 2016. "Fatimids' Daʿi Named 'Al-Mu'ayyad Fi'l-Din Hibat Allah Al-Shirazi' Who Were the Hidden Heroes of Arslan Al-Basasiri and Ibrahim Yinal Rebellions." *Tarih İncelemeleri Dergisi* 31(2):569–94. doi:https://doi.org/10.18513/egetid.282839.
Rahman, Saifur, Adilah Mahmud, and Isma Kartika. 2022. "Konstruksi Genealogi Pemikiran Raghib Al- Isfahani." *Palita: Journal of Social Religion Research*

7(1):1–26. doi:http://10.24256/pal.v7i1.2576.
Richards, D. .. 2002. *The Annals Of The Saljuq Turks Selection From Al Kamil Fi Tarikh of Izz Al Din Ibn Al Athir*. London: Routledge.
Richards, D. .. 2007. *The Chronicle of I Bn Al-Athir for the Crusading Period from Al Kami Fi'l Ta'rikh . Part 2*. New York: Ashgate Publishing.
Rohana, Sy. 2020. "Institusi Pendidikan Pada Masa Dinasti Saljuq." *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* 11(1):49–62.
Rohmatika, Frida, Afrizal, and Syawaluddin. 2025. "Dinasti Bani Saljuk Dalam Sejarah Peradaban Islam." *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 10(2). doi:ttps://doi.org/10.36989/didaktik.v11i02.6948.
Sahin, Mustafa, and Ugur Arabaci. 2020. "The Story Of An: The Power Struggle Of The Saljuk Statesman Taj Al-Mulk." *Journal of Turkish Researches Institute* 68(May). doi:http://dx.doi.org/10.14222/Turkiyat4238.
Tacong, Hamzah, Nasrullah Bin Sapa, and Hamzah Haeriyah. 2025. "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Saljuk : Telaah Terhadap Nizâm Al-Mulk Dan Imam Al-Ghazali." *JSE:Jurnal Sharia Economica* 4(3):123–38. doi:https://doi.org/10.46773/jse.v4i1.
Wangi, Dewita Sekar, and M. Mujab. 2023. "Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah (Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Politik, Ekonomi Dan Sosial Budaya)." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 8(1):13–22. doi:http://dx.doi.org/10.29300/ttjksi.v8i1.4149.
Weber, Max. 1978. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Ed. Guenther Roth and Claus Wittich*. Berkeley: University of California Press.
Yusuf, Mundzirin. 2013. "Bani Saljuk Dan Kebangkitan Peradaban Daulah Abbasiyah." *Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 14(1).